



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



TRIWULAN I
2020



Penyusun:

Penanggung Jawab: Tauhid I Ketua Tim: Siti Rosidah Sundari I
Editor: Arif Bakhri I Desain Grafis: Arif Bakhri I Anggota: A.Firdaus
Lukas Wanastya I Markus Yulianto I Arif Bakhri/ Hasby.

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Sumsel

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyusun Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2020.

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran perkembangan implementasi kebijakan fiskal Pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2020 yang diharapkan dapat menjadi media informasi yang bernilai strategis baik bagi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun bagi para mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyediakan data dan informasi hingga terbitnya Laporan Hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami berharap koordinasi dan kerjasama tersebut dapat terus berlanjut di masa mendatang guna mendukung kesinambungan implementasi kebijakan fiskal di Sumatera Selatan dan dapat diterbitkannya hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan secara berkala. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak selalu kami harapkan agar perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas hasil kajian dapat terus dilakukan.

Harapan kami semoga laporan hasil Kajian Fiskal Regional ini dapat menjadi sumber informasi penting dan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, *stakeholders* di Sumatera Selatan, dan masyarakat pada umumnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Mei 2020
Kepala Kantor Wilayah,

Taukhid



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK/GAMBAR	viii
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	
A. Produk Domestik Regional Bruto	1
B. Inflasi	2
C. Indikator Kesejahteraan	2
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	
A. Pendapatan Negara	6
B. Belanja Negara	11
C. Prognosis Realisasi APBN	17
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	
A. Pendapatan Daerah	20
B. Belanja Daerah	22
C. Prognosis Realisasi APBD sampai dengan akhir tahun 2020	23
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	24
B. Pendapatan Konsolidasian	25
C. Belanja Konsolidasian	26
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam PDRB	27
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	30



TIM PENYUSUN

PELINDUNG

Tauhid

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel

PENGARAH

Siti Rosidah Sundari

Kepala Bidang PPA II

EDITOR

Arif Bakhri

KONTRIBUTOR

BAB I Angga Firdaus

BAB II Lukas.W.Primadikta

BAB III Markus Yulianto Silitonga

BAB IV Subur

BAB V Arif Bakhri, Hasby.J.Leo

DESAIN&LAYOUT

Arif Bakhri, Hasby.J.Leo



DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1.	Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I-2020 Terhadap Triwulan IV-2019 (q-to-q)	1
Grafik I.2.	Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	2
Grafik I.3.	Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan.....	3
Grafik II.1.	Penerimaan PPh Berdasarkan Wilayah kerja KPPN s.d Triwulan I 2020.....	7
Grafik II.2.	Penerimaan PPN Berdasarkan Wilayah Kerja KPPN s.d Triwulan I 2020.....	7
Grafik II.3.	Penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional s.d Triwulan I 2020.....	9
Grafik II.4.	Realisasi PNBP BLU di Sumatera Selatan s/d Triwulan I 2020.....	10
Grafik II.5.	Realisasi PNBP Lainnya Berdasarkan Wilayah Kerja KPPN s.d Triwulan I 2020.....	10
Grafik II.6.	Perkembangan Bulanan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Sumatera Selatan periode s/d Tw III 2019.....	10
Grafik II.7.	Realisasi TKDD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan III Tahun 2019.....	11
Grafik III.1.	Komposisi dan Realisasi Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2017-2020.....	21
Grafik III.2.	PAD Lainnya Triwulan III Tahun 2017-2020.....	17
Grafik III.3.	Komposisi & Penerimaan Transfer Triwulan I Tahun 2020.....	22
Grafik III.4.	Pagu dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja dan Per Urusan	23
Grafik IV.1.	Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	25
Grafik IV.2.	Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2020.....	26
Grafik IV.3.	Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2019	27

DAFTAR TABEL

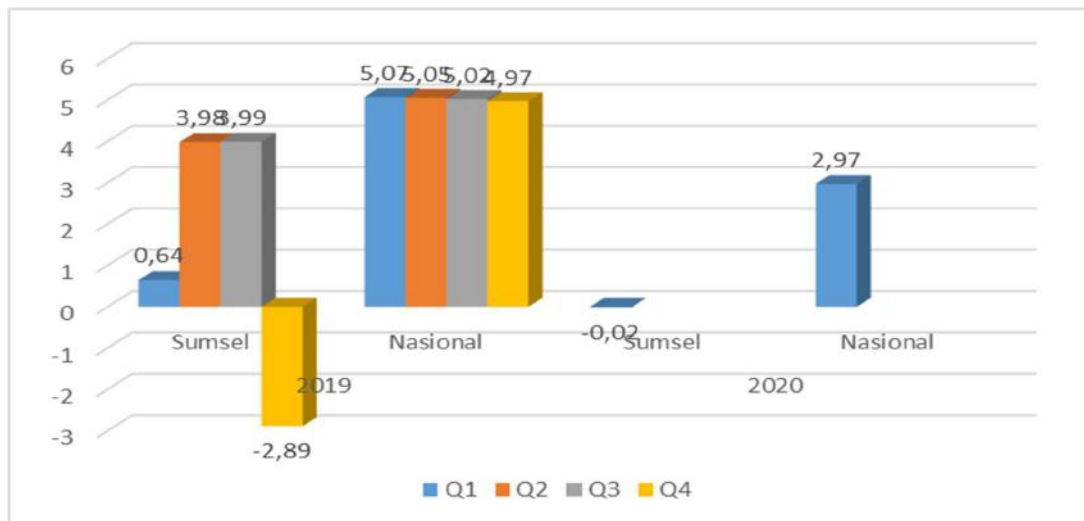
Tabel II.1.	Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Periode Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2018-2020 (miliar rupiah)	5
Tabel II.2.	Pendapatan Perpajakan Periode s.d Triwulan III Tahun 2017-2020.....	6
Tabel II.3.	Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja s/d Triwulan III Tahun 2017-2020.....	11
Tabel II.4.	Pendapatan BLU dan Belanja yang menggunakan Sumber Dana BLU untuk BLU di wilayah Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan I 2020.....	13
Tabel II.5.	Profil Penerusan Pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan Posisi s.d. 31 Desember 2019.....	14
Tabel II.6.	Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Perekonomian s/d 31 Maret Tahun 2020	15
Tabel II.7.	Perbandingan Penyaluran KUR dan PDRB Tahun 2016-2020 periode s/d 31 Maret 2020	16
Tabel II.8.	Perbandingan Penyaluran UMi Tahun 2019 dan Triwulan I 2020	16
Tabel II.9.	Perkiraan Realisasi APBN s.d. Akhir Tahun 2020	17
Tabel III.1.	Realisasi Pendapatan APBD s.d Triwulan III Tahun 2017-2020.....	18
Tabel III.2.	Realisasi Belanja APBD s.d Triwulan III Tahun 2017-2020.....	19
Tabel III.3.	Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan IV Tahun 2020 dengan analisis tren.....	23
Tabel IV.1.	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2020.....	24
Tabel V.1.	Alokasi Pagu Dana Desa Untuk Penanganan COVID 19 Pemda Provinsi Sumatera Selatan ...	32
Tabel V.2.	Perbandingan Realisasi Dana Desa Untuk Penanganan COVID 19 Pemda Provinsi Sumatera Selatan Dengan Realisasi KPPN tanggal 10-05-2020	33

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender).

Grafik I.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I-2020 Terhadap Triwulan IV-2019 (q-to-q)



Sumber: situs BPS Provinsi sumsel TA. 2020

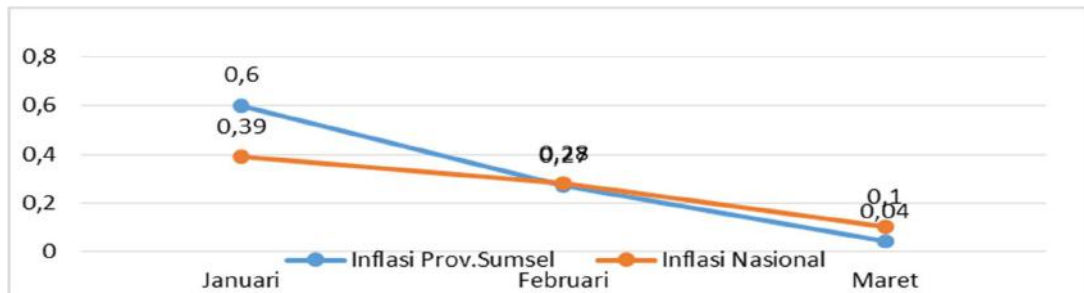
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen. Sebanyak sembilan Lapangan Usaha mengalami Kontraksi. Hal ini tidak terlepas sebagai dampak pandemi covid-19 yang mulai merebak di Sumatera Selatan pada pertengahan Maret 2020. Kontraksi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang turun sebesar 7,91 persen, diikuti Lapangan Usaha Konstruksi yang turun sebesar 5,93 persen dan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang turun sebesar 5,60 persen.

Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya PDRB (q-to-q) di sisi produksi. Sementara di sisi konsumsi, beberapa komponen pengeluaran yang mengalami kontraksi signifikan yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 59,52 persen.

B. INFLASI

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Grafik I.2. Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020



Sumber: situs BPS Provinsi sumsel TA. 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa inflasi bulanan pada Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2020 cenderung menurun. Pada bulan Januari 2020 terjadi penurunan dari bulan-bulan sebelumnya dimana bulan februari inflasi 0,27 dan pada bulan maret inflasi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,04 persen. Hal ini berbeda jika dibanding inflasi secara nasional 0,1 persen.

C. Indikator Kesejahteraan

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2020 sebanyak 4,33 juta orang, bertambah sebanyak 14,61 ribu orang atau turun sebesar 0,34 persen dibandingkan Februari 2019.

Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2020 mencapai 4,16 juta orang, berkurang sebanyak 8,33 ribu orang atau turun sebesar 0,20 persen dibandingkan keadaan Februari 2019.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2020 mencapai 3,86 persen, mengalami penurunan dibandingkan Februari 2019 sebesar 3,99 persen atau turun 0,13 poin.

Selama periode Februari 2019 – Februari 2020 terdapat 9 (sembilan) lapangan usaha mengalami peningkatan penyerapan penduduk bekerja, yaitu: kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan

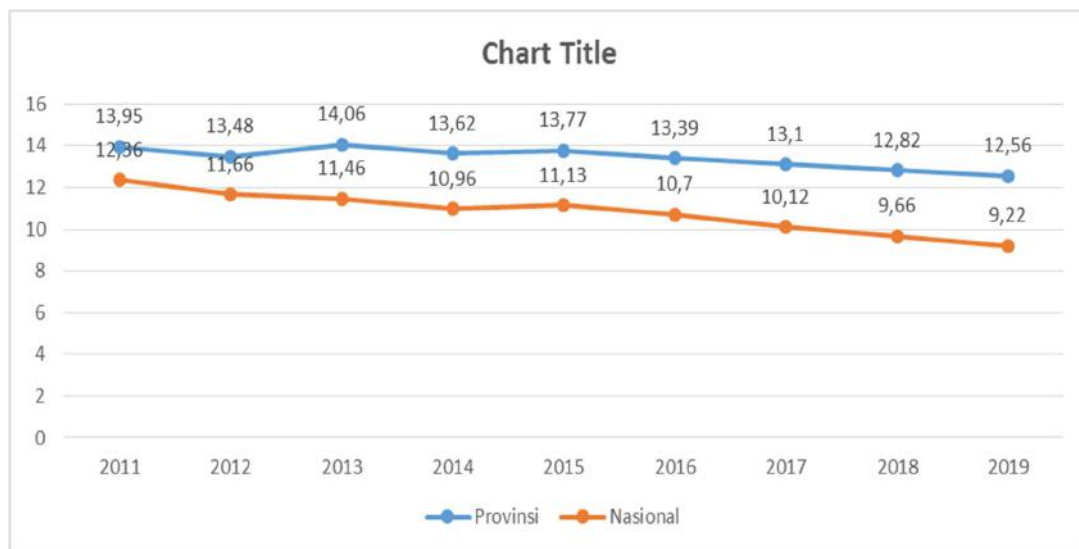
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Berdasarkan jumlah jam kerja, keadaan Februari 2020 dari 4,16 juta penduduk yang bekerja sebanyak 2,71 juta orang atau sebesar 65,23 persen bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari atau sama dengan 7 jam per minggu mencapai 63,3 ribu orang atau sebesar 1,52 persen. Keadaan Februari 2020, penduduk bekerja berpendidikan tamat SD ke bawah masih mendominasi penyerapan lapangan kerja sebesar 42,96 persen.

2. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin diukur berdasarkan tingkat garis kemiskinan yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp446.706,00 di perkotaan dan Rp389.786,00 di pedesaan.

Grafik I.3 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: situs BPS Provinsi sumsel TA. 2020

Berdasarkan garis kemiskinan tersebut maka jumlah penduduk miskin pada periode September 2019 di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.067,16 ribu orang atau sebesar 12,56 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,15 persen dibandingkan periode Maret 2019 yang sebesar 12,71 persen, sedangkan jumlahnya berkurang sebanyak 6.58 ribu orang dari 1.073,74 ribu orang. Meskipun demikian penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan masih di atas rata-rata penduduk miskin secara nasional yang sebesar 9,22 persen.



Jika dilihat dari RPJMD, walaupun penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami penurunan namun masih belum memenuhi target persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 yang sebesar 11,78 persen. Diharapkan pada sisa tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi di bawah 10 persen sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada bab ini berisi data dan analisis pelaksanaan APBN di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pengelolaan BLU dan Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat. Pelaksanaan APBN di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel II. 1. yang disajikan dalam format *I-Account* dibawah ini.

Tabel II.1. Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Periode Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2018-2020 (miliar rupiah)

URAIAN	2018			2019			2020		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
A. PENDAPATAN NEGARA	15.106,94	2.112,94	13,99	14.828,20	2.402,57	16,20	15.122,37	2.643,07	17,48
I. Penerimaan Perpajakan	13.538,05	1.730,13	12,78	13.405,95	1.851,55	13,81	13.275,14	2.182,09	16,44
II. PNBPNP	1.568,89	382,81	24,40	1.422,25	551,02	38,74	1.847,24	460,98	24,96
III. Hibah	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B. BELANJA NEGARA	43.649,78	8.264,62	18,93	49.119,14	9.418,98	19,18	44.570,91	7.683,58	17,24
I. Belanja Pemerintah Pusat	15.113,17	1.599,26	10,58	15.920,47	1.990,38	12,50	14.286,42	1.935,21	13,55
1. Belanja Pegawai	4.665,67	831,35	17,82	5.008,28	906,18	18,09	5.009,04	947,94	18,92
2. Belanja Barang	6.835,30	477,25	6,98	7.429,12	910,91	12,26	4.987,02	706,76	14,17
3. Belanja Modal	3.598,64	287,49	7,99	3.465,04	173,29	5,00	4.272,34	280,51	6,57
4. Belanja Sosial	13,57	3,17	23,35	18,03	0,00	-	18,02	0,00	-
5. Belanja Lain-lain	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	28.536,61	6.665,36	23,36	33.198,68	7.428,60	22,38	30.284,49	5.748,36	18,98
1. Transfer ke Daerah	26.269,34	6.241,44	23,76	30.514,73	7.025,02	23,02	27.571,71	5.670,36	20,57
a. DBH	7.232,03	1.370,63	18,95	10.686,91	1.943,66	18,19	7.386,30	1.189,99	16,11
b. DAU	12.331,39	4.110,46	33,33	13.009,08	4.249,89	32,67	13.131,52	3.745,05	28,52
c. DAK Fisik	2.357,10	0,00	-	2.186,79	0,00	-	2.349,18	0,00	-
d. DID	396,75	128,00	32,26	390,16	195,08	50,00	435,72	0,00	-
e. DAK Non Fisik	3.952,07	632,34	16,00	4.241,80	636,38	15,00	4.269,00	735,32	17,22
2. Dana Desa	2.267,26	423,92	18,70	2.683,95	403,58	15,04	2.712,78	78,00	2,88
C. SURPLUS/DEFISIT (A-B)	-28.542,84	-6.151,67	21,55	-34.290,94	-7.016,41	20,46	-29.448,53	-5.040,51	17,12
D. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : OM-SPAN, Monev PA, MPN-G2, Simtrada DJPK (diolah)

Pada tabel II.1. di atas, struktur APBN terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Komponen Penerimaan Dalam Negeri pada sisi Pendapatan berasal dari komponen Perpajakan dan PNBPNP. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebesar Rp2,64 triliun atau 17,48 persen dari Perkiraan Target Pendapatan Negara setelah adanya kebijakan relaksasi pajak. Realisasi tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan dengan capaian sebesar 51,23 persen dan PNBPNP sebesar 24,96 persen. Komponen Hibah bernilai nihil karena pendapatan Hibah hanya terdapat pada level kementerian/lembaga atau pada APBN tingkat nasional sedangkan Hibah

yang terdapat di satuan kerja daerah dicatat sebagai belanja. Sama halnya dengan sisi Pembiayaan yang hanya terdapat pada APBN tingkat nasional sehingga Pembiayaan pada APBN tingkat provinsi bernilai nihil.

Sisi belanja dibagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pada Belanja Pemerintah Pusat, penyerapan belanja terdapat penurunan dibandingkan tahun 2019 menjadi 17,24 persen. Penurunan ini disebabkan oleh capaian realisasi TKDD yang menurun dibanding realisasi pada tahun 2019 menjadi 18,98 persen. Sementara capaian realisasi belanja meingkat menjadi 13,55 persen. Kondisi Pendapatan dan Belanja diatas menyebabkan APBN di Provinsi Sumatera Selatan mengalami defisit sebesar Rp29,45 triliun.

A. PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara dibagi menjadi Penerimaan Perpajakan dan PNBP.

1. Pendapatan Perpajakan

Total pendapatan perpajakan di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan I 2020 berjumlah Rp2,18 triliun. Realisasi pendapatan ini meningkat sebesar Rp330,54 miliar. Berikut rincian pendapatan pajak berdasarkan jenis pendapatan perpajakan:

Tabel II.2 Pendapatan Perpajakan Periode s.d Triwulan I Tahun 2018-2020 (miliar rupiah)

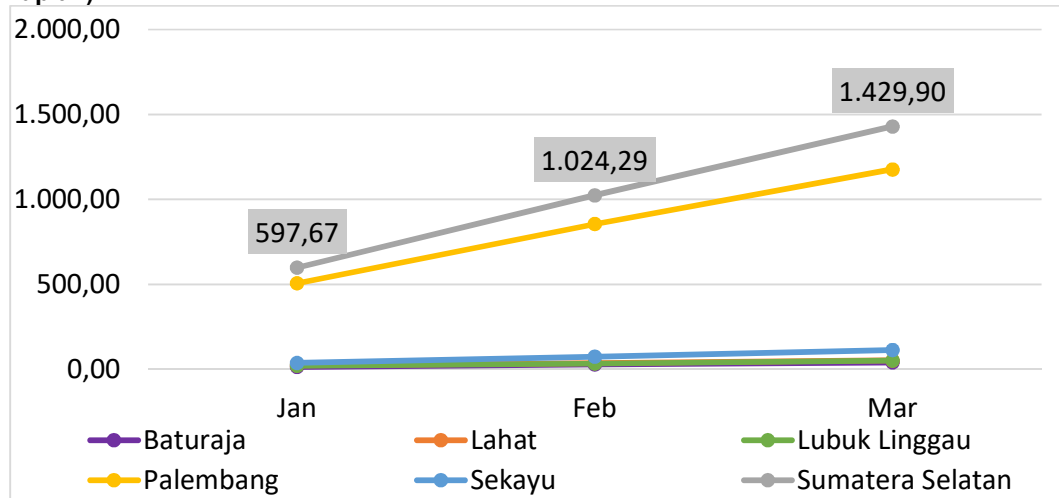
Jenis Pajak	Realisasi s.d. Triwulan I		
	2018	2019	2020
PPh	1.404,36	1.497,52	1.429,90
PPN	420,26	292,77	684,87
PBB	-154,35	5,53	8,15
Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional	31,11	22,94	25,62
Pajak Lainnya	28,76	32,79	33,56
JUMLAH	1.730,13	1.851,55	2.182,09

Sumber : MONEVPA OMSPAN 05-05-2020 (diolah)

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan total pajak penghasilan di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2020 berjumlah Rp1,43 triliun dengan rincian pendapatan per kabupaten/kota di wilayah kerja KPPN sebagai berikut:

Grafik II.1. Penerimaan PPh Berdasarkan Wilayah kerja KPPN s.d Triwulan I 2020 (miliar rupiah)



Sumber : MONEVPA OMSPAN 05-05-2020 (diolah)

Pada triwulan I tahun 2020 Pendapatan PPh mengalami penurunan sebesar Rp67,62 miliar atau 4,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, sebagai dampak dari maraknya pemberitaan pesebaran covid-19 di Indonesia di awal tahun 2020. Penurunan PPh pada periode ini didominasi oleh Penurunan PPh 21 yakni sebesar Rp67,30 yang mengindikasikan terjadinya PHK yang cukup signifikan bagi wajib pajak dengan NPWP Sumatera Selatan pada periode ini. Indikasi tersebut didukung dengan adanya data BPS yang menyatakan jumlah penduduk bekerja di wilayah Sumatera Selatan mengalami penurunan setidaknya sebanyak 8,3 ribu orang dalam jangka 1 tahun (Februari 2019-Februari 2020) di saat jumlah penduduk yang menganggur bekurang sebesar 6,3 ribu orang. Disusul di posisi selanjutnya penurunan terbesar terjadi pada PPh pasal 25/29 Badan sebesar Rp10,46 miliar yang disebabkan oleh turunnya harga komoditas dunia batubara ke angka USD 65,93/ton pada bulan Januari; melemahnya perekonomian q to q pada sektor jasa pendidikan, penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, dan jasa lainnya; serta adanya relaksasi pergeseran batas waktu pelaporan pajak dari semula 31 Maret menjadi 30 April sebagai insentif menanggulangi pandemi corona. Rangkaian hal tersebut juga berdampak pada menurunnya PPh Pasal 25/29 Pribadi sebesar Rp7,37 miliar.

Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan pajak penghasilan tertinggi terdapat di Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang dengan nilai kontribusi sebesar 82,31% disusul kemudian Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Sekayu dengan selisih nominal yang mencapai Rp 1,06 triliun. Besarnya selisih tersebut menunjukkan bahwa penyerapan lapangan usaha di Sumatera Selatan masih terpusat

pada penduduk dengan NPWP Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang. Adapun pendapatan terendah terdapat di Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Baturaja dengan realisasi sebesar Rp39,35 miliar atau sekitar 2,75% dari total pendapatan pajak penghasilan di Sumatera Selatan.

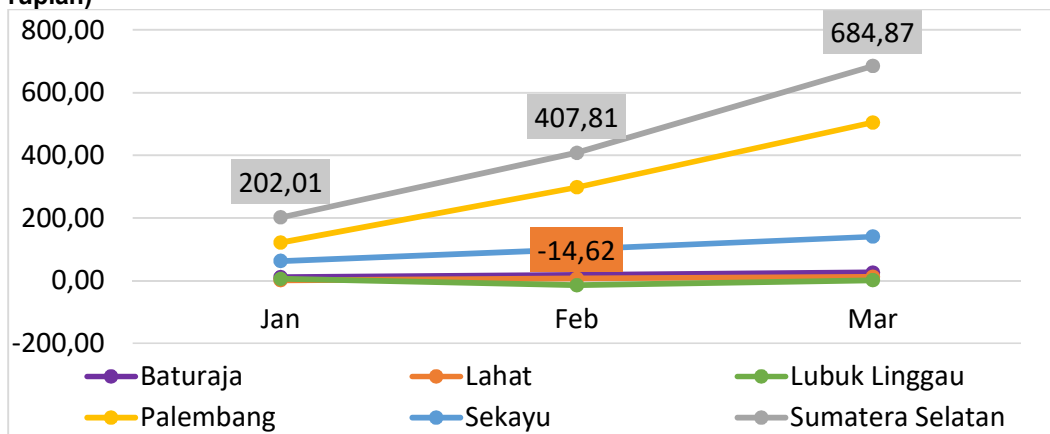
Dari grafik diatas terlihat bahwa tren pendapatan PPh pada triwulan I tahun 2020 terus mengalami penurunan sebagai dampak pandemi corona.

Realisasi restitusi PPh lingkup Sumatera Selatan hingga Maret 2020 menurun sebesar Rp23,67 Miliar atau 94,05% dari Realisasi Restitusi PPh periode yang sama pada tahun 2019.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Total Pendapatan PPN dan PPnBM di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan I 2020 sebesar Rp684,87 miliar dengan rincian pendapatan per kabupaten/kota sebagai berikut :

Grafik II.2. Penerimaan PPN Berdasarkan Wilayah Kerja KPPN s.d Triwulan I 2020 (miliar rupiah)



Sumber : MONEVPA OMSPAN 05-05-2020 (diolah)

Lain halnya dengan PPh yang mengalami tren penurunan sebagai dampak langsung dari pandemi corona, PPN pada tahun 2020 justru mengalami tren peningkatan hingga sebesar 133,93 persen dibandingkan tahun 2019. Tren yang terus meningkat ini selain disebabkan kondisi perekonomian (y-o-y) bertumbuh sebesar 4,98 persen juga merupakan dampak jangka panjang dari kebijakan percepatan realisasi restitusi pajak yang meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajak.

Kab/kota di wilayah kerja KPPN Palembang menjadi kab/kota penyumbang pendapatan PPN tertinggi di lingkup Provinsi Sumatera Selatan dengan kontribusi penerimaan sebesar 73,70 persen dibandingkan total realisasi PPN di Sumatera Selatan. Jumlah ini tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan kontribusi PPh diatas, yang

mengindikasikan bahwa aktifitas pertambahan nilai dari barang/jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen atau aktifitas usaha pengolahan yang sudah dapat dikenakan pajak tidak terlalu terpusat pada Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang lagi meskipun jumlahnya masih relatif kecil, terutama dengan adanya pandemi corona.

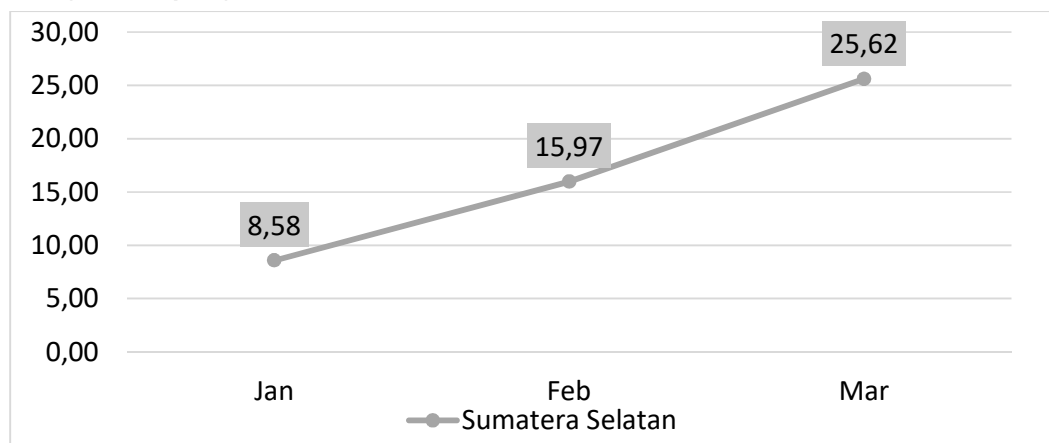
Realisasi restitusi PPN di Sumatera Selatan s/d Triwulan I 2020 mencapai Rp335,90 miliar atau sebesar 49,05% dari Setoran PPN lingkup Sumatera Selatan yang sebesar Rp684,87 miliar.

Pada periode ini Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPPN Lahat sempat mengalami penurunan realisasi PPN pada periode sampai dengan Februari

c. Pendapatan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Cukai dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional di Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan I 2020 berjumlah Rp25,62 miliar. Jumlahnya meningkat 11,68% dibanding pendapatan Triwulan I tahun 2019 yang sebesar Rp22,94 miliar.

Grafik II.3. Penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional s.d Triwulan I 2020(miliar rupiah)



Sumber : MONEVPA OM-SPAN 05-05-2020 (diolah)

Pendapatan pada sub bab ini merupakan jenis pendapatan yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Berbeda halnya dengan data perpajakan yang disajikan per KPPN, data pendapatan cukai dan perdagangan internasional disajikan secara total dikarenakan tempat transaksi dari jenis pendapatan ini berpusat di Kota Palembang. Peningkatan sejumlah 11,68 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 dipengaruhi oleh meningkatnya nilai ekspor dan impor di Sumatera Selatan masing-masing sebesar 0,96 persen dan 12,22 persen pada periode yang sama.

Dari ketiga subbab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aktifitas ekonomi masyarakat Sumatera Selatan sebagian besar masih terpusat pada Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang selaku ibukota provinsi dan Kab/kota di wilayah kerja KPPN Sekayu, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari ibukota provinsi.

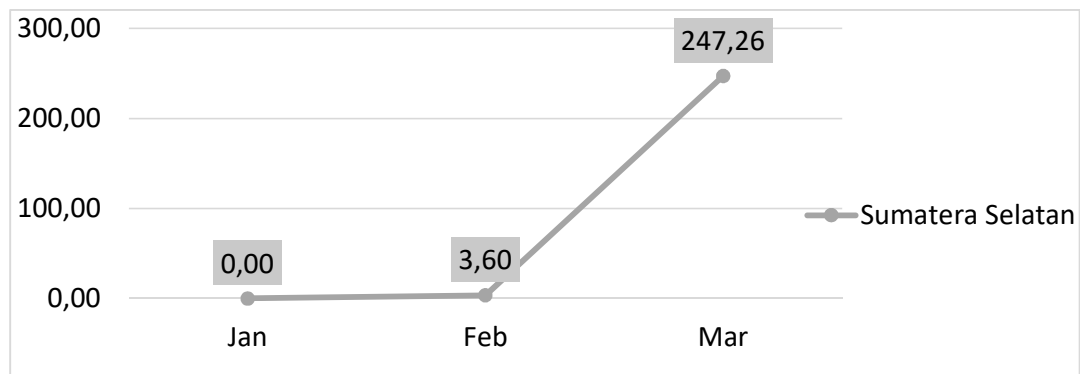
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Total penerimaan PNBPN di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan I 2020 berjumlah Rp460,98 miliar yang dominan berasal dari Pendapatan Lainnya dan Pendapatan BLU. Penerimaan PNBPN di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan terjadinya penurunan di tahun 2020.

a. Pendapatan BLU

Sesuai dengan namanya, pendapatan PNBPN yang ini berasal dari Satker BLU (Badan Layanan Umum). Terdapat 8 BLU di Provinsi Sumatera Selatan dengan total pendapatan sampai dengan triwulan I 2020 sebesar Rp247,26 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Grafik II.4. Realisasi PNBPN BLU di Sumatera Selatan s/d Triwulan I 2020 (miliar rupiah).



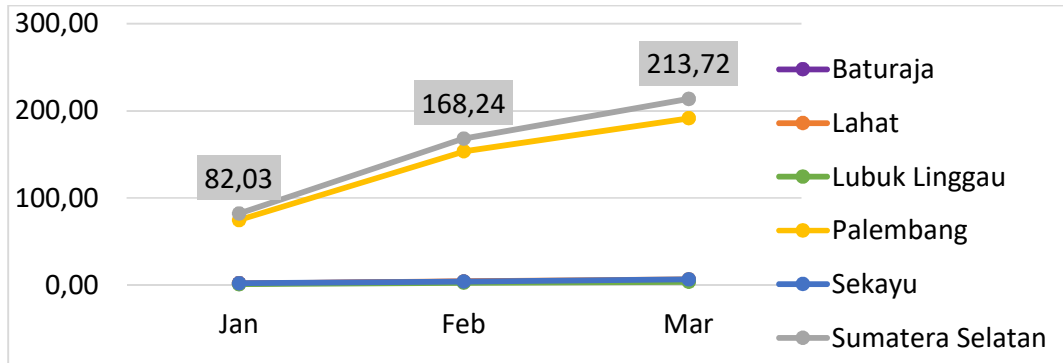
Sumber : OM-SPAN (diakses 05-05-2020)

Dari grafik diatas terlihat bahwa penerimaan PNBPN BLU baru mulai terealisasi pada bulan Februari dan meningkat pesat di bulan Maret. PNBPN BLU ini didominasi oleh BLU Kesehatan RSUP Dr. Moh. Hoesin (77,95%)

b. Penerimaan PNBPN Lainnya

Pendapatan PNBPN Lainnya sampai dengan triwulan I 2020 berjumlah Rp213,72 miliar atau 46,36 persen dari total PNBPN keseluruhan. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan 340 satker, baik satker umum maupun satker PNBPN.

Grafik II.5. Realisasi PNBPN Lainnya Berdasarkan Wilayah Kerja KPPN s.d Triwulan I 2020(miliar rupiah)



Sumber : OM-SPAN (diakses 05-05-2020)

Dari 17 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan PNBPN Lainnya tertinggi terdapat di Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang dengan nilai kontribusi sebesar 89,57%. Hal ini disebabkan oleh jumlah satker pengguna PNBPN belum banyak tersebar di Kab/Kota di luar wilayah kerja KPPN Palembang

B. BELANJA NEGARA

Belanja negara dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan I tahun 2020 berjumlah Rp1,94 triliun dengan rincian sebagai berikut:

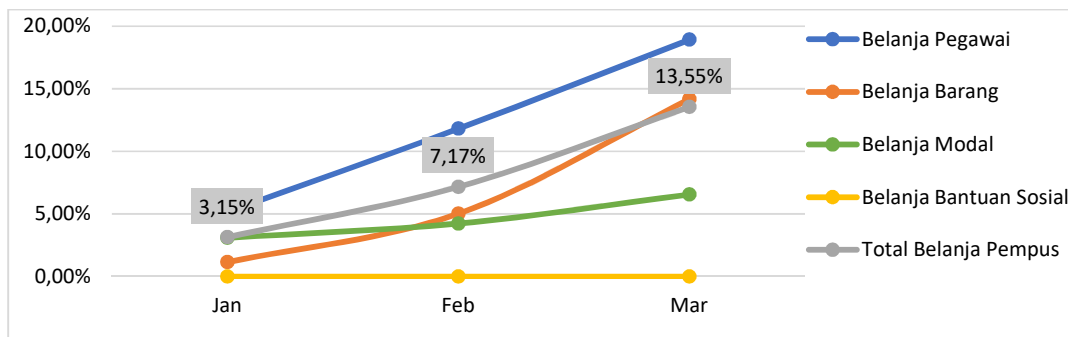
Tabel II.3. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja s/d Triwulan I Tahun 2018-2020 (miliar rupiah)

Jenis Belanja	2018		2019		2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	4.665,67	831,35	5.008,28	906,18	5.009,04	947,94
Belanja Barang	6.835,30	477,25	7.429,12	910,91	4.987,48	706,76
Belanja Modal	3.598,64	287,49	3.465,04	173,29	4.272,35	280,51
Belanja Bansos	13,57	3,17	18,03	0,00	18,02	0,00
Jumlah	15.113,17	1.599,26	15.920,47	1.990,38	14.286,89	1.935,21

Sumber: Menu MONEVPA dari sistem OM SPAN (diakses 08-05-2020)

Pagu belanja tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,26 persen dibandingkan pagu tahun 2019. Penurunan didominasi oleh Pagu Belanja Barang yang mengalami penurunan sebesar Rp2,44 triliun. Sementara Pagu Belanja yang mengalami peningkatan adalah Pagu Belanja Modal yang meningkat sebesar Rp807,31 miliar, diikuti Belanja Pegawai yang meningkat sebesar Rp760 juta.

Grafik II.6 Perkembangan Bulanan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Sumatera Selatan periode s/d Tw I 2020 (persentase)



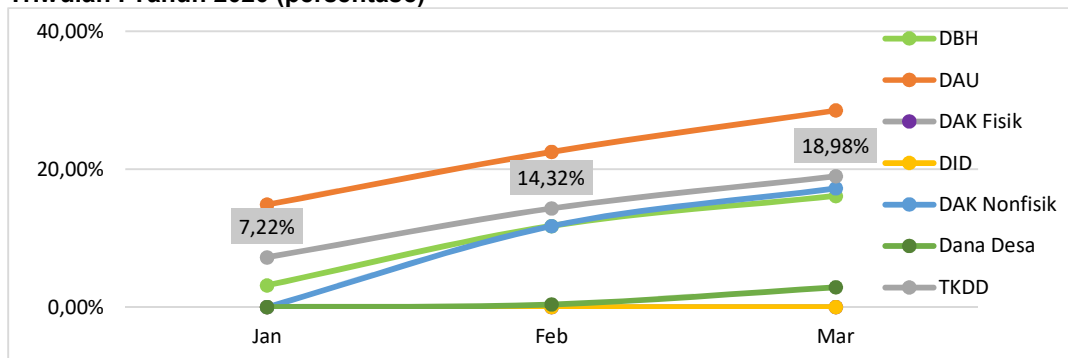
Sumber: Menu MONEVPA dari sistem OM SPAN (diakses 08-05-2020)

Realisasi Total Belanja s/d Tw I pada tahun 2020 mencapai 13,55 persen, meningkat dibanding Realisasi periode yang sama pada Tahun 2019 yang sebesar 12,50 persen. Namun begitu angka tersebut masih dibawah target realisasi triwulanan yang sebesar 15 persen dikarenakan kontribusi realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih terlalu rendah dibandingkan targetnya.

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD pada tahun 2020 mendapat alokasi pagu Rp30,28 triliun dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp5,75 triliun atau 18,98 persen. Adapun pada tahun 2020, sampai dengan triwulan I realisasi Dana Desa baru tercapai Rp78 miliar ataupun 2,88 persen, jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Penurunan capaian Dana Desa ini merupakan dampak dari pandemi corona yang menyebabkan para Perangkat Desa harus merubah kembali anggaran pada APBDes menjadi Anggaran Biaya Pendanaan Penanganan covid-19 sebelum bisa mencairkan Dana Desa. Sedangkan pada DAK Fisik belum terdapat realisasi. Pada tahun ini dana BOS yang merupakan bagian dari DAK Non Fisik mengalami perubahan mekanisme penyaluran menjadi melalui KPPN

Grafik II.7. Perkembangan Bulanan Realisasi TKDD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan I Tahun 2020 (persentase)



Sumber: Menu MONEVPA dari sistem OM SPAN (diakses 08-05-2020)

3. Pengelolaan BLU

Dalam menganalisa pengelolaan dana dan peningkatan layanan digunakan rasio BOPO yaitu menunjukkan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Data yang digunakan untuk menghitung BOPO adalah Pendapatan Jasa Layanan Umum dan Beban Barang dan Jasa BLU.

Tabel II.4. Pendapatan BLU dan Belanja yang menggunakan Sumber Dana BLU untuk BLU di wilayah Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan I 2020

Satker BLU		PNBP BLU		Pendapatan Jasa Layanan Umum		Belanja Sumber Dana BLU		Beban Barang dan Jasa BLU		BOPO	
Kode	Nama	DIPA	Real	DIPA	Real	DIPA	Real	DIPA	Real	DIPA	Real
400953 /677515	UNSRI	394,00	0,00	366,87	0,00	347,48	0,00	277,69	0,00	75,69%	-
415624	RSUP DR. Moh. Hoesin Palembang	553,00	192,74	548,49	190,66	655,85	111,15	575,82	111,15	104,98%	58,30%
415630	RS Kusta DR.Rivai Abdullah Palembang	12,00	3,29	12,00	3,29	12,00	1,38	11,48	1,38	95,70%	41,84%
415649	BB LabKes Palembang	14,17	3,94	13,50	3,87	21,28	2,03	19,78	2,03	146,59%	52,37%
424208	UIN Raden Fatah Palembang	79,60	42,93	79,60	42,60	79,60	9,43	56,87	9,43	71,44%	22,14%
517988	Poltek Transportasi Sungai Danau & Penyeberangan Palembang	0,00	1,12	0,00	1,10	11,32	0,00	11,32	0,00	-	0,01%
526200	Poltek Penerbangan Palembang	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	100,00%	-
650840	Rumkit Bhayangkara Palembang	39,22	3,23	39,22	3,10	42,41	2,21	38,78	2,21	98,87%	71,30%
GRAND TOTAL		1.101,28	247,26	1.068,97	244,63	1.179,23	126,20	1.001,04	126,20	93,65%	51,59%

Sumber: Menu MONEVPA dari sistem OM SPAN (diakses 08-05-2020)

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa keseluruhan BLU memiliki nilai BOPO dari DIPA 93,65% yang dapat diartikan bahwa dalam menyediakan layanan, BLU tidak memungut tarif yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan pendapatan yang diperoleh

dari kegiatan operasional kecil dan lebih dari setengahnya terpakai hanya untuk menunjang operasional. Khusus untuk Poltek RSUP Moh. Hoesin Palembang dan BB Labkes Palembang memiliki Belanja Operasional yang melebihi Pendapatan Operasional. Seluruh BLU mengalokasikan 84,89 persen Belanja dengan Sumber Dana BLU untuk menunjang operasional layanan. Khusus Poltek Penerbangan Palembang & Poltek Transportasi, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengalokasikan seluruh Belanja untuk operasi layanan. Hanya Poltek Transportasi, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang tidak memiliki Target Pendapatan layanan.

4. Manajemen Investasi Pusat

a. Penerusan Pinjaman

Tabel II.5. Profil Penerusan Pinjaman di Sumatera Selatan Posisi s.d. 31 Desember 2019

No	Nomor SLA	Nama SLA	Penerima/Jumlah SLA	Penarikan	Hak Tagih Pemerintah
1	2074401	SLA-EKS BI/EKS RDI/1978	PDAM Tirta Musi PLB	3.010.426.000	-
2	2074301	SLA-EKS BI/1978	PDAM Tirta Musi PLB	13.870.899.892	-
3	2073501	RDA-244/DP3/1996	PDAM Kab. MURA	-	-
4	2192001	SLA-1225/DSMI/2009	Pemkab. Muara Enim	97.148.652.820	-
5	2246001	RPD-334/Eks.RDA-244	Pemkab. Musirawas	-	-
6	2114301	SLA-610/DDI/1991	Pemkab. OKU	155.566.680	-
7	9114801	AMA-129/RDA-13/DSMI		231.577.221	-
8	9114701	AMA-130/PRJ-055/2012		219.213.675	-
9	9114901	AMA-131/RDA-76/DSMI		997.297.790	-
10	9114601	AMA-132/PRJ-756/2012		2.920.000.000	-
11	9114401	AMA-439/SLA-039/2012		1.388.170.301	-
12	9114501	AMA-440/SLA-682/2012	Pemkot Palembang	13.933.768.510	-
13	2114701	PRJ-055/MD.4/1987		1.000.000.000	1.005.010.304
14	2114801	RDA-013/DDI/1988		578.942.961	1.010.034.618
15	2114901	RDA-76/DDI/1992		997.297.790	4.220.716.509
16	2114401	SLA-039/DDI/1982		1.791.404.270	2.307.131.263
17	2114501	SLA-682/DP3/1992		25.736.672.960	56.390.595.813
Posisi s/d 31 Des 2019			17	163.979.890.870	64.933.488.507
Posisi s/d 31 Des 2018			14	147.098.564.978	159.689.924.088

Sumber: Rekonsiliasi Outstanding Januari 2020

Pada Triwulan I 2020 dilakukan Rekonsiliasi Outstanding posisi per 31 Desember 2019. Jumlah penerusan pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari 4 debitur dengan 14 pinjaman (SLA) menjadi 7 debitur dengan 17 pinjaman (SLA). Rekonsiliasi outstanding pinjaman yang dilakukan semesteran berlangsung baik dengan akurasi rekonsiliasi yang mencapai 100 persen.

b. Kredit Program

Kredit Program yang gencar disalurkan oleh Pemerintah adalah program KUR dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha (UMKM dan koperasi) yang produktif dan layak (feasible) namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (unbankable).

Tabel II.6. Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Perekonomian s/d 31 Maret Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)

Sektor	s/d 31 Mar 2020		PDRB Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah)	Sensitifitas KUR Terhadap PDRB
	Penyaluran (dalam Miliar Rupiah)	Debitur (orang)		
Pertanian	456,18	10.701	17.440,00	2,73%
Perikanan	20,27	477		
Perdagangan Besar & Eceran	447,87	9.375	16.480,00	2,72%
Jasa Kemasyarakatan	47,68	1.132	6.910,00	0,69%
Industri Pengolahan	49,42	1.113	23.230,00	0,21%
Penyediaan Akomodasi	30,81	458	2.350,00	1,31%
Real Estate	13,10	156	4.010,00	0,33%
Transportasi	13,07	202	6.460,00	0,20%
Konstruksi	4,86	32	13.850,00	0,04%
Jasa Kesehatan	3,59	46	820,00	0,44%
Jasa Pendidikan	0,69	11	2.800,00	0,02%
Pertambangan & Penggalian	0,06	2	21.970,00	0,00%
Total	1.087,59	23.705	116.320,00	0,93%

Sumber : sikip.kemenkeu.go.id. (diakses 13-04-2020), BRS Perekonomian Sumatera Selatan

Apabila dibandingkan secara kasar antara angka penyaluran berdasarkan sektor perekonomian dengan angka PDRB per sektor maka terlihat bahwa keseluruhan penyaluran KUR di Sumatera Selatan hanya mampu memberikan efek sebesar 0,93% terhadap PDRB Sumatera Selatan. Di antara seluruh sektor perekonomian tampak bahwa sektor Pertanian dan Perdagangan mampu memberikan pengaruh sebesar 2,73% dan 2,72%

Tabel II.7. Perbandingan Penyaluran KUR dan PDRB Tahun 2016-2020 periode s/d 31 Maret 2020 (dalam miliar Rupiah)

Tahun	Penyaluran	Outstanding	Debitur	PDRB	Sensitifitas KUR terhadap PDRB
2016	585,29	54,85	18.802	84.745,60	0,69%
2017	427,34	43,06	13.636	91.091,30	0,47%
2018	692,43	232,49	19.144	99.443,60	0,70%
2019	818,97	554,30	21.290	108.058,90	0,76%
2020	1.087,59	1.041,74	23.705	116.320,00	0,93%
Total	3.611,62	1.926,44	96.577	499.659,40	0,72%

Sumber : sikip.kemenkeu.go.id. (diakses 13-04-2020), BPS Sumatera Selatan

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa penyaluran KUR periode s/d 31 Maret terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi corona tidak langsung berdampak mengurangi penyaluran KUR.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tabel II.8. Perbandingan Penyaluran UMi Tahun 2019 dan Triwulan I 2020

No	Wilayah	2019			Q1 - 2020		
		Penyaluran (dalam juta Rupiah)	Debitur	Rata-rata Pinjaman per Debitur (dalam juta Rupiah)	Penyaluran (dalam juta Rupiah)	Debitur	Rata-rata Pinjaman per Debitur (dalam juta Rupiah)
1	Kota Palembang	1.837,70	339	5,42	6.276,40	1.837	3,42
2	Kab. Muara Enim	4.071,70	1.510	2,70	4.296,00	1.419	3,03
3	Kab. Banyuasin	3.162,50	887	3,57	3.632,20	998	3,64
4	Kab. OI	46,50	7	6,64	3.468,60	1.105	3,14
5	Kota Prabumulih	344,80	113	3,05	1.043,80	392	2,66
6	Kota Lubuk Linggau	116,20	18	6,46	95,00	14	6,79
7	Kab. OKU	56,80	10	5,68	39,00	4	9,75
8	Kab. Lahat	74,50	11	6,77	29,50	4	7,38
9	Kab. OKI	418,50	77	5,44	23,00	3	7,67
10	Kota Pagar Alam	13,50	2	6,75	16,00	2	8,00
11	Kab. OKU Timur	15,00	2	7,50	10,70	3	3,57
12	Kab. Musi Rawas	9,00	2	4,50	9,00	2	4,50

13	Kab. OKU Selatan	4,00	1	4,00	8,00	1	8,00
14	Kab. Musi Banyuasin	7.242,50	2.167	3,34	6,00	1	6,00
15	Kab. Empat Lawang	2,00	1	2,00	0,00	-	0,00
16	Kab. PALI	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
17	Kab. Muratara	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Total		17.415,20	5.147	3,38	18.953,20	5.785	3,28

Sumber : sikp.umi.id. (diakses 13-04-2020)

Lain halnya dengan penyaluran KUR yang masih menunjukkan data penyaluran yang masih berimbang di periode yang sama, penyaluran UMi justru menunjukkan peningkatan yang sangat masif sehingga melebihi penyaluran dalam satu tahun

C. PROGNOSIS REALISASI APBN

Analisis yang digunakan untuk menghitung prognosis Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan triwulan IV tahun 2020 menggunakan analisis trend berdasarkan pagu/target dan realisasi tahun 2018-2019.

Tabel II.9. Perkiraan Realisasi APBN s.d. Akhir Tahun 2020 (miliar rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Tw-III		Perkiraan Realisasi s.d. Tw-IV	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Negara	15.122,38	2.643,07	17,48%	12.176,83	80,52%
Penerimaan Pajak	13.275,14	2.182,09	16,44%	10.069,39	75,85%
PNBP	1.847,24	460,98	24,98%	2.272,20	123,01%
Belanja Negara	44.570,91	7.683,58	17,24%	42.721,56	95,85%
Surplus/Defisit	-29.448,53	-5.040,51	17,12%	-30.464,32	103,45%

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Dalam bab ini diuraikan mengenai perkembangan pelaksanaan APBD di lingkup Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2020. Terdapat 3 (tiga) sub bab yang menjadi pokok bahasan yaitu Pendapatan, Belanja, dan Prognosis APBD.

Tabel III.1. Realisasi Pendapatan APBD s.d Triwulan I Tahun 2018-2020 (miliar Rupiah)

Uraian	2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PAD	6.660	1.215	18%	6.881	1.072	16%	8.237	936	11%
Pajak Daerah	4.317	911	21%	4.989	720	14%	5.559	564	10%
Retribusi Daerah	244	26	11%	233	23	10%	248	28	11%
Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	205	96	47%	212	100	47%	255	117	46%
Lain-lain PAD yang Sah	1.894	182	10%	1.448	229	16%	2.175	226	10%
PENDAPATAN TRANSFER	25.874	6.217	24%	31.656	7.534	24%	31.074	4.878	16%
Transfer Pusat- Dana Perimbangan	23.308	5.885	25%	28.407	6.601	23%	28.511	4.756	17%
DBH Pajak	3.413	660	19%	4.463	748	17%	3.684	324	9%
DBH Bukan Pajak	3.715	715	19%	5.246	1.163	22%	5.766	823	14%
DAU	12.312	3.959	32%	12.822	4.066	32%	13.069	3.417	26%
DAK	3.868	551	14%	5.875	624	11%	5.992	192	3%
DID dan Dana Penyesuaian	1.399	265	19%	1.599	260	16%	1.046	0	0%
Transfer Pemprov	1.142	64	6%	1.542	673	44%	1.424	122	9%
Bantuan Keuangan	25	3	13%	107	0	0%	92	0	0%
LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.012	262	13%	2.450	263	11%	3.353	52	2%
Hibah	638	1	0%	777	1	0%	1.222	42	3%
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	1.374	261	19%	1.673	262	16%	2.131	9	0%
TOTAL PENDAPATAN	34.546	7.695	22%	40.986	8.869	22%	42.664	5.865	14%

Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2020, diolah)

Realisasi pendapatan APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp5,87 triliun, secara nominal maupun persentase merosot cukup drastis dibandingkan dua periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya realisasi pada semua komponen pendapatan daerah, baik itu PAD, Pendapatan Transfer maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Namun komponen yang menyumbang penurunan tersebut sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer, dimana realisasinya menurun sebesar Rp2,67 triliun dari Triwulan I Tahun 2019 hingga menjadi Rp4,88 triliun. Kemudian, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami

penurunan yang cukup besar dibandingkan dua periode sebelumnya dimana pada Triwulan I Tahun 2019 mencapai Rp263 miliar (11% dari pagu Rp2,45 triliun) lalu pada Triwulan I Tahun 2020 hanya mencapai Rp52 miliar (2% dari target Rp3,35 triliun).

Hal yang sama terjadi pada Belanja dan Transfer juga mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada sisi realisasi belanja APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 hanya mencapai Rp3,57 triliun, menurun masing-masing 3 persen dan 4 persen dibandingkan dua periode yang sama Tahun 2018 dan 2017. Penurunan tersebut berasal dari realisasi belanja transfer yang hanya mencapai 5 persen dari pagu Rp5,62 triliun, sedangkan pada periode sebelumnya mencapai 21 persen dan 8 persen. Demikian juga pada belanja modal juga mengalami penurunan dimana pada Triwulan I Tahun 2020 realisasinya hanya mencapai Rp105 miliar, sedangkan pada belanja operasi justru meningkat sehingga mencapai 12 % dari pagu Rp27,75 triliun. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat belanja modal merupakan belanja yang memiliki *multiplier effect* dalam jangka panjang terhadap perekonomian dibandingkan belanja operasi yang dampaknya cenderung singkat.

Tabel III.2. Realisasi Belanja APBD s.d Triwulan I Tahun 2018-2020 (miliar Rp)

APBD Klasifikasi Ekonomi	2018			2019			2020		
	Pagu	Realisasi	%2	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Operasi	24.136	3.863	16%	25.799	2.965	11%	27.745	3.199	12%
Belanja Pegawai	12.122	2.106	17%	12.828	1.971	15%	12.840	2.072	16%
Belanja Barang dan Jasa	8.269	781	9%	9.769	859	9%	10.745	879	8%
Belanja Bunga	102	21	21%	65	6	9%	68	8	11%
Belanja Subsidi	41	11	26%	66	9	14%	42	2	4%
Belanja Hibah	2.044	773	38%	2.061	79	4%	2.683	193	7%
Belanja Bantuan Sosial	13	1	6%	28	1	3%	344	37	11%
Belanja Bantuan Keuangan	1.545	171	11%	981	40	4%	1.023	8	1%
Belanja Modal	7.843	227	3%	9.320	202	2%	9.282	105	1%
Belanja Tanah	87	5	6%	192	2	1%	184	1	0%
Belanja Peralatan dan Mesin	969	38	4%	1.467	61	4%	1.275	42	3%
Belanja Gedung & Bangunan	1.386	24	2%	1.611	18	1%	1.816	9	0%
Belanja Jalan dan Jaringan	5.031	151	3%	5.535	120	2%	5.242	52	1%
Belanja Aset Tetap Lainnya	354	9	2%	334	1	0%	377	0	0%
Belanja Aset Lainnya	16	0	0%	182	0	0%	388	0	0%
Belanja Tak Terduga	113	0	0%	129	1	1%	69	9	13%
Transfer/ Bagi Hasil Bantuan Kab/Kota/Desa	2.782	216	8%	6.167	1.272	21%	5.620	253	5%
TOTAL	34.874	4.306	12%	41.414	4.440	11%	42.717	3.565	8%

Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2020, diolah)

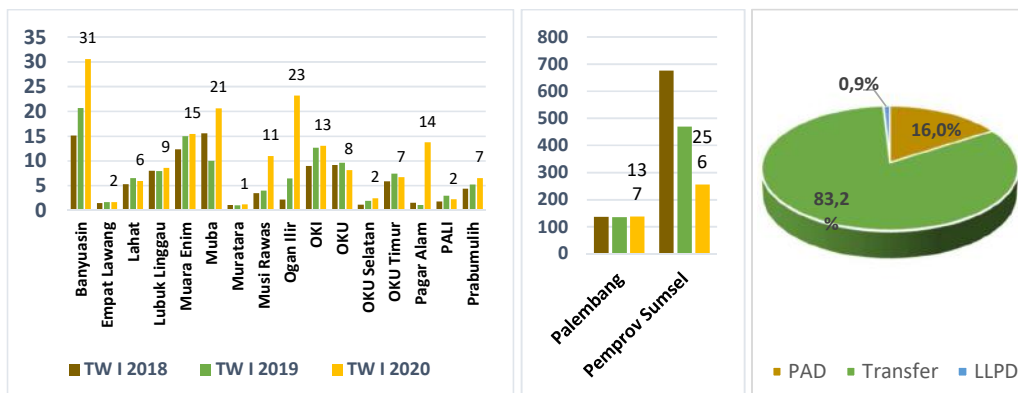
A. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 mencapai 14 persen dari target (Rp42,67 triliun).

1. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah secara agregat sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 mencapai Rp564 miliar atau mencapai 10 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian penerimaan pajak daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 4 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya dimana pada triwulan I tahun 2018 capaian realisasi pajak daerah menunjukkan prestasi yang sangat baik yaitu mencapai 21 persen, dan pada triwulan I Tahun 2019 mencapai 14 persen.

Grafik III.1 Komposisi dan Realisasi Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2018-2020 (miliar Rp)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2020, diolah)

Provinsi Sumsel memberikan kontribusi terbesar capaian Pajak Daerah sebesar Rp256,28 miliar atau 45,41 persen dari agregat penerimaan Pajak Daerah se-Provinsi Sumsel yang merupakan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan tingkat persentase capaian, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan yang terendah yaitu hanya mencapai 9 persen dari target Rp13,55 miliar. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah yaitu PAD 16

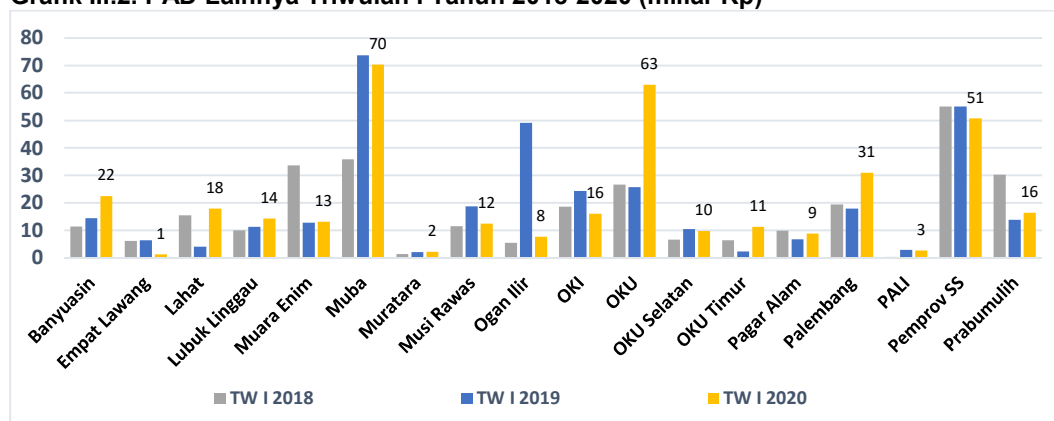
Tingkat ketergantungan keuangan daerah diperoleh dari rasio transfer pemerintah pusat terhadap pendapatan daerah sangat tinggi dimana mayoritas di atas rata-rata regional (81,1 persen). Daerah yang berada di bawah rata-rata regional yaitu Kabupaten OKU 43,4%, Pemprov Sumatera Selatan 60,5 persen, dan Kota Palembang 73,9%. Hal ini dapat berarti bahwa pendapatan yang bersumber dari PAD kontribusinya masih sangat kecil sehingga masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.

persen, Pendapatan Transfer 83,2 persen dan LLPD (Lain-lain pendapatan daerah yang sah) 0,9 persen. Berdasarkan kontribusi ini dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan pemda terhadap dana transfer sangat tinggi yang berarti pula bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah.

2. PAD Lainnya (RD, HPKD, LLPAD)

PAD lainnya merupakan komponen PAD selain pajak daerah yang meliputi Retribusi Daerah (RD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD) yang pada Triwulan I Tahun 2020 realisasinya mencapai Rp371 miliar (13,87 persen dari target Rp2,68 triliun). Kinerja realisasi PAD lainnya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dimana realisasinya pada Triwulan I Tahun 2018 s.d. Tahun 2020 masing-masing 12,99 persen, 18,59 persen dan 13,87 persen. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya realisasi HPKD dimana pada Triwulan I Tahun 2020 mencapai 45,78 persen dari target Rp255,12 miliar.

Grafik III.2. PAD Lainnya Triwulan I Tahun 2018-2020 (miliar Rp)



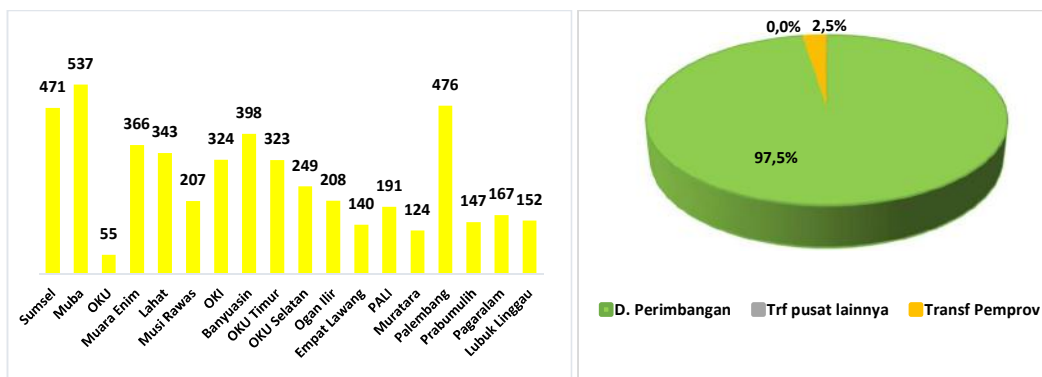
Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2020, diolah)

Dari grafik di atas terlihat bahwa PAD lainnya Triwulan I Tahun 2020 yang meningkat cukup signifikan terdapat di Kabupaten Muba didorong oleh realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Triwulan I Tahun 2020 telah mencapai Rp15,21 miliar atau 86,89 persen dari target Rp17,5 miliar sehingga menyebabkan nilai realisasinya menjadi yang tertinggi diantara 17 Pemda lainnya meski secara persentase Kabupaten OKU memiliki realisasi tertinggi yang mencapai 61,61 persen.

3. Penerimaan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 telah mencapai 15,74 persen dari target Rp30,98 triliun yaitu Rp4,88 triliun, yang bersumber dari Transfer Dana Perimbangan Rp4,76 triliun, Transfer pusat lainnya masih nihil, transfer pemerintah provinsi Rp121,67 miliar, dan bantuan keuangan juga masih belum memberikan sumbangsih pada pendapatan transfer.

Grafik III.3. Komposisi & Penerimaan Transfer Triwulan I Tahun 2020 (miliar Rp)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2020, diolah)

Dilihat dari komposisinya, penerimaan transfer pusat memberikan kontribusi mencapai 97,51 persen dari total pendapatan transfer. Penerimaan Transfer Pusat Triwulan I Tahun 2020 didominasi oleh DAU (71,84%), DBH (24,12%), dan DAK (4,04%). Tingginya porsi DAU yang melebihi DBH tersebut sejalan dengan kebijakan penguatan desentralisasi dan perkembangan sektor migas yang belum membaik. Selain itu, DAK mendapatkan porsi yang signifikan sejalan dengan kebijakan transfer berbasis kinerja dimana penyaluran dana disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaannya. Kapasitas penerimaan transfer tertinggi adalah Provinsi Sumsel (Rp470,79 miliar), dan Kabupaten Muba (Rp537,44 miliar) diikuti Kota Palembang (Rp476,47 miliar) dan Kabupaten Muara Enim (Rp365,70 miliar). Tingginya transfer di Kabupaten Muba didorong oleh produksi migas dan batubara di daerah tersebut.

*"..Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Taukhid menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan 17 kabupaten/kota mendapatkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp30,28 triliun."
 (http://www.radar-palembang.com/rp500-miliar-tkdd-tak-terrealisasi/, diakses tanggal 8 Mei 2020)*

B. BELANJA DAERAH

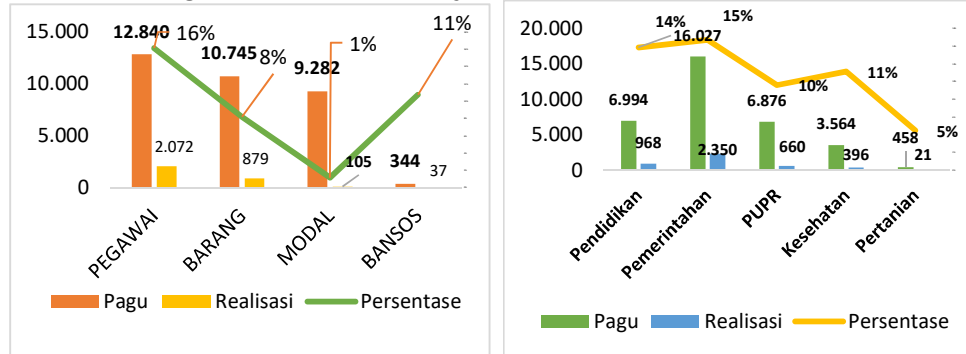
Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer/ Bagi Hasil Ke Daerah. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp3,57 triliun (8 persen dari pagu Rp42,72 triliun).

Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Belanja pegawai dan belanja barang merupakan jenis belanja dengan pagu tertinggi masing-masing Rp12,84 triliun dan Rp10,75 triliun dengan realisasi Rp2,07 triliun (16%) dan Rp879 miliar (8%). Sedangkan belanja modal yang merupakan belanja produktif antara lain untuk infrastruktur realisasinya baru sebesar Rp105 miliar (1 persen). Belanja bantuan sosial dengan pagu dan realisasi yang terendah mencapai 11 persen dari pagu,

yang merupakan belanja bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

Grafik III.4. Pagu dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja dan Per Urusan (miliar rupiah)



Sumber : Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2020), diolah

C. PROGNOSIS REALISASI APBD SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2020

Metode yang digunakan untuk menghitung prognosis atau perkiraan realisasi APBD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 adalah menggunakan analisis tren. Data yang digunakan merupakan data realisasi APBD tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020.

Tabel III.3. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan IV Tahun 2020 dengan analisis tren (triliun rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Triwulan I		Perkiraan Realisasi Tw IV	
		Rp	% Realisasi	Rp	% Realisasi
Pendapatan Daerah	42,66	5,87	13,75%	41,77	97,90%
Belanja Daerah	42,72	3,57	8,35%	39,88	93,35%

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu.

Pendapatan negara konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya komponen pendapatan negara yang meliputi penerimaan perpajakan dan pendapatan bukan pajak dan penyebab faktor lainnya yaitu hibah. Pajak sebagai komponen terbesar pendapatan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp182,99 miliar atau 7,13 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel IV.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2020 (jutaan rupiah)

Uraian	2020				2019
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan/ Penurunan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	2.643.050,91	5.669.641,02	3.607.935,20	11,0%	3.250.671,51
Pendapatan Perpajakan	2.182.093,70	565.065,72	2.747.159,42	7,1%	2.564.168,22
Pendapatan Bukan Pajak	460.957,21	361.409,47	818.477,52	23,4%	663.277,19
Hibah	0,00	42.298,25	42.298,25	82,1%	23.226,09
Transfer *)	0,00	4.700.867,57	0,00	0,0%	0,00
Belanja Negara	7.683.577,72	3.542.107,69	6.520.928,67	12,7%	5.787.376,96
Belanja Pemerintah	1.935.214,93	3.388.647,18	5.323.862,11	4,0%	5.118.019,85
Transfer *)	5.748.362,79	153.460,51	1.197.066,56	78,8%	669.357,10
Surplus/(Defisit)	-5.040.526,81	2.127.533,34	-2.912.993,47	14,8%	-2.536.705,45
Pembiayaan	0,00	298.304,40	298.304,40	-68,0%	932.671,88
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	348.673,49	348.673,49	-67,1%	1.058.973,58
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	50.369,08	50.369,08	-60,1%	126.301,70
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan					
Anggaran	-5.040.526,81	2.425.837,74	-2.614.689,07	63,0%	-1.604.033,56

Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2020), diolah.

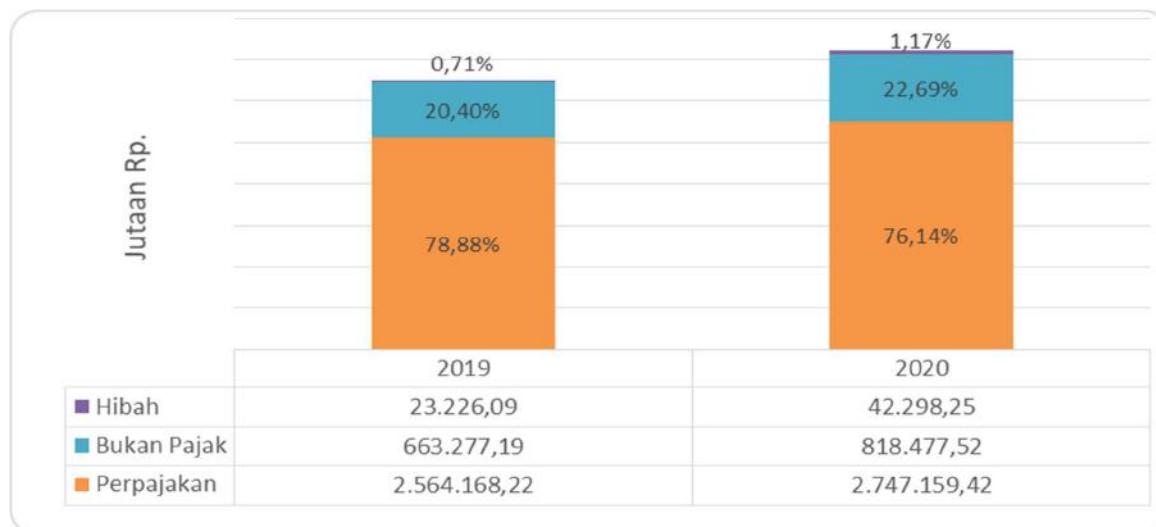
Dari sisi belanja negara juga menunjukkan hal yang sama, terjadi kenaikan sebesar Rp733,55 miliar atau 12,67 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi belanja pemerintah terbesar terjadi pada belanja pegawai sebesar 6 persen. Namun untuk belanja barang terjadi penurunan sebesar 10,01% dari tahun 2019, penurunan terbesar terjadi pada belanja subsidi sebesar 81,49 persen. Hal ini biasa terjadi pada awal tahun anggaran, namun biasanya belanja tersebut akan mulai meningkat pada periode triwulan berikutnya.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

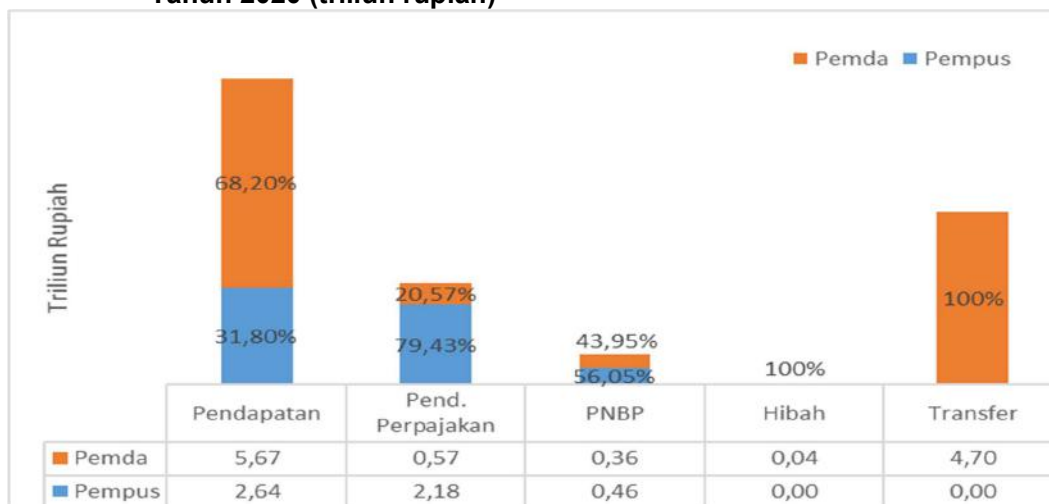
Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2020 dan Tahun 2019 (jutaan rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2020) diolah.

Grafik IV.1 menunjukkan komposisi pendapatan konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 mengalami kenaikan 11,00 persen. Komposisi pendapatan konsolidasian tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar 76,14 persen, sedangkan pendapatan bukan pajak sebesar 22,69 persen, dan pendapatan hibah sebesar 1,17 persen. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, secara komposisi pendapatan konsolidasian tidak mengalami perubahan yang signifikan, di mana penerimaan dari perpajakan sebesar 78,88 persen, pendapatan bukan pajak sebesar 20,40 persen, dan hibah sebesar 0,71 persen. Secara nominal penerimaan perpajakan meningkat sebesar Rp182,99 miliar atau sebesar 7,14 persen, penerimaan bukan pajak meningkat sebesar Rp155,20 miliar atau 23,40 persen, sedangkan pendapatan dari hibah meningkat sebesar Rp19,07 miliar atau 82,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik IV.2 Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2020 (triliun rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2020), diolah.

Grafik IV.2 menunjukkan pendapatan konsolidasian berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila dibandingkan, pendapatan pemerintah daerah masih mendominasi yaitu mencapai sebesar Rp5,67 triliun atau 68,20 persen, sedangkan pendapatan pemerintah pusat mencapai Rp2,65 triliun atau 31,80 persen. Apabila dilihat lebih detail lagi, pendapatan Pemerintah Daerah tersebut didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pendapatan Transfer sebesar Rp4,7 triliun. Pendapatan perpajakan didominasi oleh penerimaan dari pemerintah pusat sebesar Rp2,18 triliun, sedangkan Pemerintah Daerah sebesar Rp0,57 triliun, dengan PNBPN masih didominasi pusat sebesar Rp0,46 triliun, sedangkan Pemerintah Daerah sebesar Rp0,36 triliun. Sedangkan dua jenis penerimaan lainnya, yaitu hibah dan transfer seluruhnya berasal dari pemerintah daerah.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

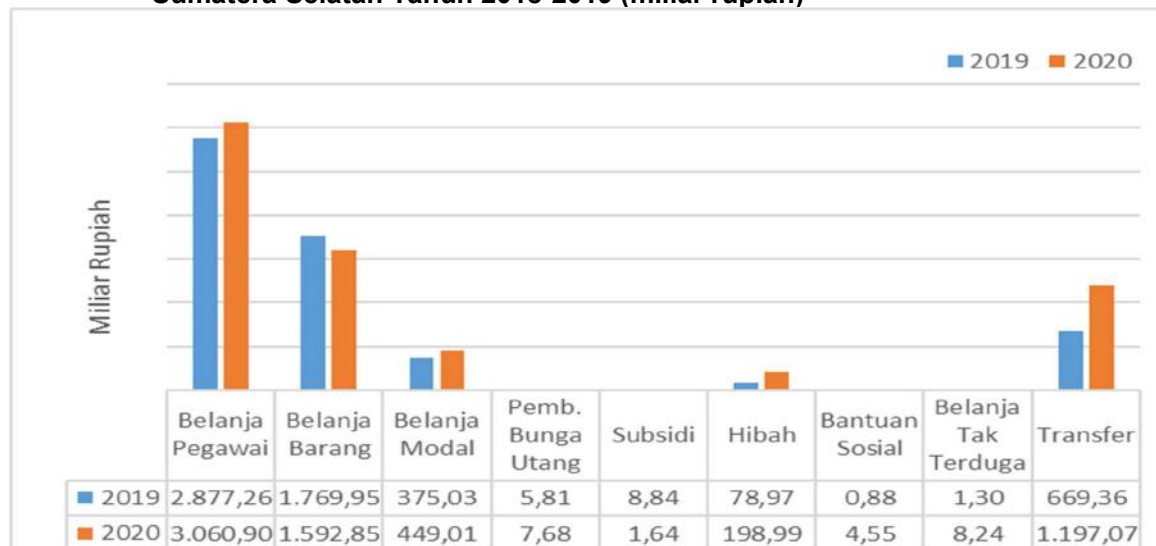
Belanja Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja Konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 12,7 persen dari Rp5,78 triliun pada Triwulan I Tahun 2018 menjadi Rp6,52 triliun. Kontribusi belanja paling besar berasal dari belanja pegawai yang mencapai 46,94 persen dari total belanja konsolidasian, sedangkan belanja modal baru mencapai 6,89% persen dari total belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa pada awal tahun 2020 belanja pemerintah masih didominasi oleh belanja yang tidak produktif dikarenakan belanja produktif seperti belanja barang dan terutama belanja modal masih dalam tahap proses pengadaan barang/jasa. Biasanya untuk kedua jenis belanja tersebut akan mulai meningkat

realisasinya pada triwulan selanjutnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik IV.3 di bawah ini:

Grafik IV.3 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2019 (miliar rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2019, diolah).

Hal lain yang dapat dilihat secara lebih detail dari grafik di atas adalah secara umum sebagian besar belanja mengalami kenaikan, kecuali dua jenis belanja yang mengalami penurunan yaitu belanja barang dan belanja subsidi. Belanja pegawai mengalami peningkatan 6,38 persen, sedangkan belanja barang mengalami penurunan sebesar 10,01 persen dan belanja modal mengalami kenaikan sebesar 19,73 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup signifikan adalah belanja Hibah yaitu sebesar 81,49 persen.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Pelaporan 2020:

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto	
Pendapatan:	11.355.638.018.217
a. Pajak	2.746.412.085.509
b. Kontribusi sosial	-
c. Hibah	102.534.183.490
d. Pendapatan lain	8.506.691.749.218
Beban:	6.136.043.552.940
a. Kompensasi pegawai	3.118.871.679.965
b. Penggunaan barang dan jasa	1.523.893.958.406

c. Konsumsi aset tetap	-
d. Bunga	7.680.126.310
e. Subsidi	1.635.376.062
f. Hibah	1.456.509.686.212
g. Manfaat sosial	4.549.325.846
h. Beban Lainnya	22.903.400.138
Keseimbangan operasi bruto/neto	5.219.594.465.277
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	449.010.216.480
a. Aset tetap	444.619.367.728
b. Persediaan	-
c. Barang berharga	-
d. Aset non produksi	4.390.848.752
Net Lending/Borrowing	4.770.584.248.796
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	
a. Akuisisi Neto Aset Keuangan	4.741.993.487.714
- Domestik	4.741.993.487.714
- Luar Negeri	-
b. Keterjadian Kewajiban	-28.590.761.082
- Domestik	-28.590.761.082
- Luar Negeri	-
SILPA Konsolidasian	-

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB.

Dari tabel laporan operasional tersebut diatas dan data BPS dapat diketahui bahwa:

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar Rp4.647.314.964.217,- yang terdiri dari:
 - a. Kompensasi pegawai sebesar Rp 3.118.871.679.965,-
 - b. Penggunaan barang dan jasa sebesar Rp 1.523.893.958.406,-
 - c. Konsumsi aset tetap sebesar Rp0,-
 - d. Manfaat sosial sebesar Rp4.549.325.846,-
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PTMB) sebesar Rp 444.619.367.728,-
3. PDRB Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp116,30 triliun. (Berita resmi Statistik 5 Mei 2020).

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB dapat diketahui dengan membandingkan pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut terhadap PDRB sehingga angka yang diperoleh adalah sebesar 3,9 persen. Demikian juga kontribusi belanja aset tetap pemerintah sebagai PMTB dari pemerintah dapat dibandingkan dengan nilai

PDRB sehingga diperoleh angka sebesar 0,38 persen. Walaupun nilainya kecil, belanja asset pemerintah atau investasi pemerintah tetap mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena belanja aset ini memang bersifat jangka panjang.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I Tahun 2020 terhadap triwulan I Tahun 2019 hampir terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi ada pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 8,62 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ekspor barang luar negeri sebesar 9,11 persen, yang disumbang oleh komoditi batubara sebesar 39,35 persen dan migas sebesar 24,85 persen. Selain itu, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,33 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,81 persen.

Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Ekspor Luar Negeri; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P); sedangkan peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil.

V. BERITA FISKAL REGIONAL TERPILIH

KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER UNTUK PENANGANAN KRISIS PANDEMIC COVID 19.

Sebagaimana yang kita ketahui, wabah/pandemic virus COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia menyebabkan negara yang terdampak virus dimaksud di seluruh dunia semakin memburuk kondisi Perkeonomian nya, beberapa lembaga Keuangan antara lain International Monetary Fund (IMF) bahkan memprediksikan akan terjadi perlemahan ekonomi dunia dengan pertumbuhan ekonomi global yang tumbuh minus di angka 3%.

Komitmen Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan upaya-upaya Pemerintah untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal,

Proses Kebijakan penanganan Covid 19 di pemda Provinsi Sumatera Selatan sudah ditempuh lebih awal dengan penyesuaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Penanganan COVID-19 dengan berpedoman kepada Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan perubahan postur APBD provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	Perubahan Postur APBD Prov. Sumsel Sesuai Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020		Penyesuaian	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Penambahan/Pengurangan	%
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
PENYESUAIAN PENDAPATAN DAERAH					
1	Pendapatan Asli Daerah	4.051.157.668.289	4.051.157.668.289	-	0,0%
2	TKDD	6.238.603.629.984	6.238.603.629.984	-	0,0%
3	Pendapatn lain-lain	65.637.725.864	65.637.725.864	-	0,0%
	Total Pendapatan Daerah	10.355.399.024.137	10.355.399.024.137	-	0,0%
PENYESUAIAN BELANJA DAERAH					
1	Belanja Pegawai	39.027.864.000	19.027.864.000	-20.000.000.000,00	-51,2%
2	Belanja Barang/Jasa	1.724.456.640.577	1.642.702.888.577	-81.753.752.000,00	-4,7%
3	Belanja Modal	2.241.154.711.498	2.222.333.311.498	-18.821.400.000,00	-0,8%
4	Belanja Sosial	-	-	-	0,0%
5	Belanja Lainnya	6.537.011.918.748,30	6.657.587.070.748,30	120.575.152.000	1,8%
	Total Belanja Daerah	10.541.651.134.823	10.541.651.134.823	-	
		41.794.100.317.921	41.794.100.317.921	-	

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 diinstruksikan kepada semua OPD untuk melakukan efisiensi belanja dalam rangka penambahan Belanja Lainnya (BTT) untuk dialihkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya di kumpulkan ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai pagu bentukan BTT untuk penanganan COVID-19.

Dari tabel di atas terlihat kalau anggaran kegiatan yang diusulkan dalam refocusing kegiatan dan realokasi anggaran telah mendukung Percepatan Penanganan COVID 19. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 telah melakukan efisiensi belanja langsung yang berasal dari Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Luar Daerah sebesar Rp120.575.152.000 (Seratus dua puluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan Rp16.084.166.039 (Enam belas milyar delapan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu tiga sembilan rupiah) yang berasal dari saldo BTT awal tahun 2020. Jadi total BTT untuk penanganan COVID sebesar Rp136.659.321.039 (Seratus tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga sembilan rupiah)

Pemda Provinsi Sumsel (bersama tiga belas pemerintah kabupaten/kota pada provinsi Sumatera Selatan) tidak melakukan perubahan Postur pendapatan sesuai petunjuk yang terdapat pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional sehingga dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan atau dana bagi hasil (DBH) sebesar 35%.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan Anggaran I BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tersebut karena pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih tersedia sisa dana sebesar Rp 110.983.970.879 (dari pagu bentukan BTT sebesar total Rp 136.659.318.039 karena realisasi yang baru mencapai Rp 25.675.347.160,- jadi seyogyanya sisa dana dimaksud harus dihabiskan terlebih dahulu sebelum dilakukannya perubahan alokasi pendapatan pada Postur APBD Sumsel pasca refocusing.

Realisasi untuk pos Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pemda provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 13 mei 2020 sebesar Rp 25.675.347.160,- adalah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	No. SP2D	Uraian	Realisasi	
				UP/GU/TU	LS
1	13/04/2020	00672/SP2D/4.04.01.02/2020	Belanja Tidak Terduga untuk biaya Penanganan Pandemi Penyakit Menular <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No.238/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 7 April 2020 dan 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tanggal 24 Maret 2020	0	2.849.920.000
2	15/04/2020	00701/SP2D/4.04.01.02/2020	Belanja Tidak Terduga untuk biaya Penanganan Pandemi Penyakit Menular <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No.238/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 7 April 2020 dan 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tanggal 24 M	0	21.827.611.121
3	17/04/2020	00720/SP2D/4.04.01.02/2020	Belanja Tidak Terduga untuk biaya Penanganan Pandemi Penyakit Menular <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No.238/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 7 April 2020 dan 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tanggal 24 M	0	997.816.039
Jumlah					25.675.347.160

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan upaya-upaya Pemerintah untuk mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

1. Temu wicara pada kantor BPKAD Prov. Sumsel
2. Siaran Pers KEMENKEU no SP-27_KLI_2020
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan , Bapak Yusnin.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic
5. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5007421/siapa-yang-berhak-dapat-bltdesa-cek-di-sini-rinciannya>



KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Gedung Keuangan Negara Lantai 2
Jl. Kapten A. Rivai No 2- 4 Palembang

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Sumsel